



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 48 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 60);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

## **BAB III SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Pasal 4**

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I : Dinas Pendidikan  
Lampiran II : Dinas Kesehatan

Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **Pasal 6**

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

**Pasal 7**

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

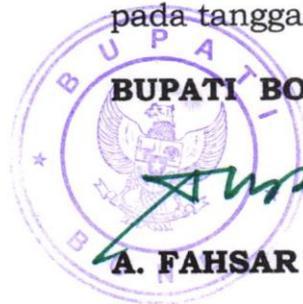
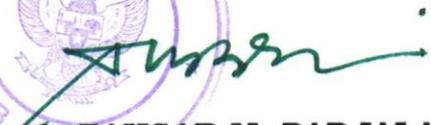
**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

  
**BUPATI BONE,**  
  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 Juli 2021

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**  
  
**ANDE ISLAMUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 48

## KATA PENGANTAR

Pertama - tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselesaikan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone pada hakikatnya merupakan agenda kerja tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2022 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan mengacu pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran koreksi dan perbaikan dari semua pihak demi penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai acuan agenda kerja tahunan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Bone.

Bone,

Mei 2021

Kepala Dinas Peternakan  
dan Kesehatan Hewan  
Kabupaten Bone



Drh. H. Anis Handono

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19611030 199003 1 003

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
 <b>BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	78
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	83
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	97
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	142
 <b>BAB III. DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	163
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	165
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas.....	168
 <b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .</b>	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	173
 <b>BAB V. PENUTUP</b> .....	
	<b>218</b>
 <b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Efisiensi atas Penggunaan Anggaran Tahun 2020	.....
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Bone (T-C 29)	.....
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD-IKD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022 (T-C. 30)	.....
Tabel 2.4	Gambaran Pelayanan PD, Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L, dan Sasaran Jangka menengah Renstra PD Provinsi/Kab/Kota	.....
Tabel 2.5	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Bone	.....
Tabel 2.6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	.....
Tabel 2.8	Tantangan dan Peluang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone	.....
Tabel 2.9	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan (T.C 31)	.....
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Bone (T.C.32)	.....
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone	.....
Tabel 3.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan Renja Dinas Tahun 2022	.....

Tabel 3.3	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Prioritas	.....
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	.....
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Mau Tahun 2023 Kabupaten Bone (T.C. 33)	.....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan merupakan bagian yang integral dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Bone. Sektor peternakan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Disamping itu, sektor peternakan memiliki peranan dalam meningkatkan nilai tambah pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pembangunan sektor peternakan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, yang memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah setidaknya memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan 1). Teknokratik, pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, 2). Partisipatif, pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, 3). Politis, pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. 4). Atas – Bawah dan Bawah – Atas, pendekatan atas bawah dan bawah – atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah

pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten / Kota, Daerah Provinsi hingga nasional.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan : 1). Holistik – tematik, Pendekatan holistik – tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan / atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, 2). Integratif, pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, 3). Spasial, pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN

Sebagai tambahan untuk dasar penyusunan Renja 2022 didasarkan adanya penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Selain itu adanya perubahan kondisi lingkungan yaitu Bencana Non-Alam dengan menyebarnya wabah Pandemi Covid-19 memberi imbas negatif pada beberapa aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, penyebaran wabah COVID-19. *Kedua*, aspek ekonomi, diperkirakan mengalami perlambatan. *Ketiga*, aspek sosial, berdampak meningkatnya angka pengangguran dan

kemiskinan. *Keempat*, aspek keuangan, menurunnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dan perubahan struktur APBD Kabupaten Bone.

Terkait dengan amanat tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai acuan penyusunan kebijakan dalam anggaran dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun 2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
4. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri;

11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian ketujuh pasal 125 sampai dengan pasal 143 dan penjelasan teknis penyusunan pada Lampiran bagian C. Tata Cara Penyajian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah sub bagian C.5. Penyajian Dokumen Renja
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 tahun 2020 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun 2022.

#### Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program kegiatan/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022, serta sebagai acuan dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone.

##### 1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun 2022.

- 1.3. Maksud dan Tujuan  
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone
- 1.4. Sistematika Penulisan  
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, serta susunan garis besar isi dokumen

## **Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun Lalu**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone  
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone
- 3.3. Program dan Kegiatan  
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### **Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Menyajikan gambaran rencana kerja perangkat daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, lokasi, kelompok sasaran beserta pendanaan yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

### **Bab V Penutup**

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE TAHUN 2020

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan hasil kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Bone tahun 2020 sebagai berikut :

##### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

###### **1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp.124.500.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.733.856,- (91,35%)

Output Kegiatan ini adalah :

Jumlah rekening pembayaran tagihan listrik, telfon/internet dan air

Outcome

Cakupan Ketersediaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

## 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan input Tahun 2020 berupa dana sebesar Rp.2.050.000.- dengan realisasi keuangan Rp.1.760.000.- (85,85%)

Output Kegiatan ini adalah

- Jumlah Paket Pengadaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.

Outcome kegiatan ini adalah:

- Cakupan Ketersediaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

## 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 38.385.600.- dengan realisasi keuangan Rp.37.385.600.- (97,39%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Tersedianya Admnistrasi Kantor

Outcome kegiatan ini adalah:

- Cakupan Ketersediaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

**4. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan.** Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 12.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.8.740.000.- (72,83%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pembayaran Media Yang Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Outcome kegiatan ini adalah:

- Cakupan Ketersediaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

## 5. Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan luar Daerah.

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 327.120.828,- dengan realisasi keuangan Rp. 327.105.898,- (100%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah

Outcome kegiatan ini adalah:

- Cakupan Ketersediaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

## 6. Kegiatan Pelaksanaan administrasi Perkantoran

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 108.874.750,-  
dengan realisasi keuangan Rp. 88.751.350,- (81,52%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- Outcome kegiatan ini adalah:
- Cakupan Ketersediaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

## B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

### 1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 75.000.000.-  
dengan realisasi keuangan Rp. 74.698.000,- (99,60%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Gedung Kantor Terpelihara
- Outcome kegiatan ini adalah:
- Cakupan realisasi peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

### 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 47.700.000.-  
dengan realisasi keuangan Rp. 47.050.324,- (98,64%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Outcome kegiatan ini adalah:
- Cakupan realisasi peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

### 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 10.000.000.-  
dengan realisasi keuangan Rp. 9.970.000,- (99,70%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara
- Outcome kegiatan ini adalah:
- Cakupan realisasi peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

#### 4. Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Masukan Input Tahu 2020 berupa dana Rp. 145.000.000,-

Dengan Realisasi Keuanagmn Rp. 134.355.900,- (92,66%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Outcome Kegiatan ini adalah

- Cakupan realisasi peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

#### 5. Pengadaan Mubeuler

Masukan Input Tahu 2020 berupa dana Rp. 35.000.000,-

Dengan Realisasi Keuanagmn Rp. 35.000.000,- (100%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pengadaan Meubeler

Outcome Kegiatan ini adalah

- Cakupan realisasi peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

#### C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 55.000.000.-

dengan realisasi keuangan Rp. 2.750.000,- (5%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal.

Outcome kegiatan ini adalah:

- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

#### D. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

##### 1. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 11.300.000.-

dengan realisasi keuangan Rp. 11.220.000,- (99,29%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Kelompok Peternak Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pendampingan .

Outcome kegiatan ini adalah:

- Persentase Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Peternak

## 2. Kegiatan Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp.379.699.750 .-  
dengan realisasi keuangan Rp.379.610.750,- (99,98%)

Output Kegiatan ini adalah:

- Jumlah Peningkatan Mutu Kelompok Tani Peternak Yang Di Bina

Outcome kegiatan ini adalah:

- Persentase Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Peternak

## 3. Kegiatan Pelatihan dan Pelaku Agribisnis

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp.120.700.200 .-  
dengan realisasi keuangan Rp.120.700.200,- (100%)

Output Kegiatan ini adalah:

- Jumlah Kelompok Tani Peternak Yang Di Bina

Outcome kegiatan ini adalah:

- Persentase Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Peternak

## E. Program Penunjang Pemerintahan Umum

### 1. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Perangkat Daerah Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp.  
277.875.000.- dengan realisasi keuangan Rp. 277.840.050,- (99.99%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Tersusun.

Outcome kegiatan ini adalah:

- Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum.

## F. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak

### 1. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Penanggulan Penyakit Menular Ternak,

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 253.345.000.-  
Dengan realisasi keuangan Rp. 252.125.899,- (99,52%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Persentase Tingkat Penurunan Kasus Kejadian Penyakit ternak

Outcome kegiatan ini adalah:

- Jumlah Ternak Yang Divaksinasi Rabies/Anthrax.

## **G. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**

### **1. Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak**

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 127.970.000.-

dengan realisasi keuangan Rp. 123.250.000,- (96,31%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pengadaan Bibit Ternak (Strow) dalam Kontainer.

Outcome kegiatan ini adalah:

- Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

### **2. Kegiatan pengembangan Agribisnis peternakan**

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 3.706.397.972.-

dengan realisasi keuangan Rp. 1.900.957.150,- (51,29%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Kelompok Ternak Yang Di Bina.

Outcome kegiatan ini adalah:

- Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

### **3. Kegiatan peningkatan sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan**

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 435.880.000.-

dengan realisasi keuangan Rp. 415.921.000,- (95,42%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Inseminasi Buatan (N2 Cair)

Outcome kegiatan ini adalah:

- Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

## **H. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**

### **1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana pasar produksi Hasil peternakan**

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp.1.434.061.000.-

dengan realisasi keuangan Rp.1.366.132.302- (95,62%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah sarana Dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan Yang Mendapatkan Pemeliharaan.

Outcome kegiatan ini adalah:

- Presentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

## **2. Kegiatan promosi atas hasil produksi Peternakan Unggulan daerah**

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 60.199.900.-

dengan realisasi keuangan Rp. 57.449.900,- (95,43%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Kegiatan Pameran dan Pasar Murah Yang Di Ikuti

Outcome kegiatan ini adalah:

- Presentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

## **3. Kegiatan Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi Hasil Peternakan**

Masukan input Tahun 2020 berupa dana Rp. 183.290.000.-

dengan realisasi keuangan Rp. 183.187.000,- (99,94%)

Output Kegiatan ini adalah :

- Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan Binaan Dalam Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan.

Tabel 2.1 Efisiensi atas Penggunaan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran	Capaian (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	96,57	82,90	13,67
2.	Meningkatnya Produksi dan Kualitas Ternak	96,45	89,93	6,52
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani/Peternak	118,10	88,93	29,17
	Rata-rata capaian	103,70	87,52	16,45

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 , Dinas peternakan dan kesehatan hewan cukup efisien dalam menggunakan anggaran belanja. Hal ini berdampak baik bagi instansi karena dapat melakukan penghematan dalam menggunakan anggaran.

1. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil:
  - Menghimbau kepada para pelaksana kegiatan agar memperhatikan arus kas yang telah mereka tetapkan untuk dapat direalisasikan tepat pada waktunya
  - Menghimbau kepada para pelaksana kegiatan hendaknya selalu memperhatikan tahapan pelaksanaan kegiatan , sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan
  - Melakukan percepatan proses tender dan kontrak pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik.
  - Perlu ditingkatkan perbaikan manajemen pemeliharaan dan manajemen produksi semen beku terutama pada sapi-sapi bali yang baru/ yang muda yang dipeliharakan pada UPT IB untuk meningkatkan produksi semen beku.
  - Dalam masa pandemik corona ini tetap mengoptimalkan kegiatan yang ada dengan tetap kerja di rumah dan di kantor semaksimal mungkin menggunakan media dan sarana yang ada.
  - Pengadaan vaksin tetap dilaksanakan untuk tahun selanjutnya namun masih perlu kesadaran peternak untuk memperhatikan biosecurity yaitu pada kandang dan ternak untuk mencegah wabah semakin meluas terutama AI.

- Diperlukan komitmen bersama antar para pimpinan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati bersama di awal tahun pelaksanaan.

Capaian realisasi Tahun 2020 dan target 2021 awal renstra dan akhir renstra 2023 dapat dilihat pada Tabel TC 29 berikut :

**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas Peternakan Kab. Bone

lembar 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
1	<b>URUSAN WAJIB</b>									
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan (%)	398.120.000	1.654.950.000	398.120.000	<b>4.270.247.972</b>	1.073	398.120.000	6.323.317.972	15,88294477
	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak (strow) dalam kontainer (Unit)	102.270.000	219.450.000	102.270.000	127.970.000	125	102.270.000	449.690.000	4,397086145
	Pengembangan Agribisnis Pertenakffan	Jumlah Kelompok Peternak Yang Dibina (Kelompok)	125.000.000	1.155.000.000	125.000.000	3.706.397.972	2.965	125.000.000	4.986.397.972	39,89118378
	Peningkatan sarana dan prasarana inseminasi buatan	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Inseminasi Buatan (N2 Cair) (Liter)	170.850.000	280.500.000	170.850.000	435.880.000	255	170.850.000	887.230.000	5,193034826

			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan (%)	480.000.000	602.800.000	480.000.000	<b>1.677.550.900</b>	349	480.000.000	2.760.350.900	5,750731042
			Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan Yang Mendapatkan Pemeliharaan (Unit)	100.000.000	115.500.000	100.000.000	1.434.061.000	1.434	100.000.000	1.649.561.000	16,49561
			Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.	Jumlah Kegiatan Pameran Dan Pasar Muirah Yang Di Ikuti (Kegiatan)	180.375.200	127.050.000	180.375.200	60.199.900	1	180.375.200	367.625.100	2,038113333
			Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pemasaran produk peternakan Yang Dilaksanakan (Kegiatan)	15.000.000		15.000.000		0	15.000.000	15.000.000	1
			Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey pengelolaan informasi pasar (Laporan)	30.000.000		30.000.000	183.290.000	611	30.000.000	213.290.000	7,109666667
			Peningkatan Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Binaan Dalam Pengelolaan dan pemasaran produksi hasil peternakan (Klp)	154.624.800	360.250.000	154.624.800			154.624.800	514.874.800	3,329833248
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Peternak (%)	502.795.000	1.225.950.000	502.795.000	<b>511.699.950</b>	102	502.795.000	2.240.444.950	4,455980966

			Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Pelaku Usaha Peternakan yang mengikuti Pelatihan Agribisnis Peternakan (Orang)	75.000.000	565.950.000	75.000.000	120.700.200	161	75.000.000	761.650.200	10,155336
			Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agrobisnis	Jumlah Kelompok Peternak Yang Mendapatkan pembinaan dan Pendampingan (Klp)	46.800.000	110.000.000	46.800.000	11.300.000	24	46.800.000	168.100.000	3,591880342
			Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Kelompok Yang mendapatkan Kenaikan Kelas (Klp)	25.000.000	110.000.000	25.000.000		0	25.000.000	135.000.000	5,4
			Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah peningkatan mutu Kelompok Peternak yang dibina (Klp)	355.995.000	440.000.000	355.995.000	379.699.750	107	355.995.000	1.175.694.750	3,302559727
			Asuransi Ternak	Jumlah Ternak Yang Mendapatkan Asuransi (Ekor)	0		0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Tingkat Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Ternak (%)	240.000.000	452.760.000	240.000.000	253345000	106	240.000.000	946.105.000	3,942104167
			Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Ternak Yang divaksinasi Rabie/ Anthrax (Ekor)	240.000.000	452.760.000	240.000.000	253.345.000	106	240.000.000	946.105.000	3,942104167
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase Ketersediaan Produk Peternakan Unggulan (%)	0		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi peternakan Tepat Guna (Paket)	0		0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

			Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna (Klp)	0				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			Penjaminan Pangsa Pasar Hewan yang ASUH serta Pemenuhan Produk Hewan yang Aman dan Berdaya Saing	Jumlah Pasar Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal ASUH (Unit)	0				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan	Persentase Tingkat Pemberdayaan Penyuluh Peternakan (%)	0			0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunan	Jumlah Penyuluh Peternakan yang Terlatih (Orang)	0				0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			Penyuluhan dan Bimbingan Pengembangan Usaha Peternakan	Jumlah Kelompok Yang Mendapatkan penyuluhan bimbingan pengembangan usaha peternakan (Klp)	0				0	2%	0	0	#DIV/0!
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	672.318.550	823.341.750	672.318.550	612931178	91	672.318.550	2.108.591.478	3,136298229	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon/ internet, dan air (rekening)	189.500.000	176.715.000	189.500.000	124.500.000	66	189.500.000	190.715.000	2,589525066	

			Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	2.900.000	4.042.500	2.900.000	2.050.000	71	2.900.000	8.992.500	3,100862069
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Honoror/kontrak/Sukarela yang diberikan jasa/ upah kerja dan Asuransi selama setahun (Kali)	177.384.000	219.854.250	177.384.000	38.385.600	22	177.384.000	435.623.850	2,455823806
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kali)	15.000.000	12.705.000	15.000.000	12.000.000	80	15.000.000	39.705.000	2,647
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah (kegiatan)	175.000.000	265.650.000	175.000.000	327.120.828	187	175.000.000	767.770.828	4,387261874
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	112.534.550	144.375.000	112.534.550	108.874.750	97	112.534.550	365.784.300	3,250417761
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	858.010.000,00	839.595.000	858.010.000,00	312700000	36	858.010.000,00	2.010.305.000	2,342985513
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ operasional (unit)	0	44.000.000	0			0	44.000.000	#DIV/0!
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	40.000.000	244.860.000	40.000.000	145.000.000	363	40.000.000	429.860.000	10,7465

			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Paket)	45.000.000	17.325.000	45.000.000		0	45.000.000	62.325.000	1,385
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur (Paket)	35.000.000		35.000.000	35.000.000	100	35.000.000	70.000.000	2
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Kegiatan)	625.760.000	406.360.000	625.760.000	75.000.000	12	625.760.000	1.107.120.000	1,769240603
			Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	102.250.000	109.725.000	102.250.000	47.700.000	47	102.250.000	259.675.000	2,539608802
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara (Paket)	10.000.000	17.325.000	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	37.325.000	3,7325
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	77.080.000	57.750.000	77.080.000	55000000	71	77.080.000	189.830.000	2,462765957
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)	50.080.000	57.750.000	50.080.000	55.000.000	110	50.080.000	162.830.000	3,251397764
			Bimbingan Teknis	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis (orang)	27.000.000		27.000.000		0	27.000.000	27.000.000	1
			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	150.000.000		150.000.000	374725000	250	150.000.000	524.725.000	3,498166667
			Penyusunan Renacan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Anggaran Yang Tersusun (dokumen)	50.000.000		50.000.000	277.875.000	556	50.000.000	327.875.000	6,5575
			Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website yang dikelola (website)	50.000.000		50.000.000	40.000.000	80	50.000.000	90.000.000	1,8

			Promosi dan Pameran pembangunan	Jumlah Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (kegiatan)	50.000.000		50.000.000	56.850.000	114	50.000.000	106.850.000	2,137
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	1
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang tersusun (dokumen)	50.000.000		50.000.000		0	50.000.000	50.000.000	1
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah			207.900.000					207.900.000	#DIV/0!
			Monitoring Dan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Tersedianya Program Evaluasi dan Pelaporan Program (Dokumen)		207.900.000					207.900.000	#DIV/0!

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengukur capaian kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap faktor – faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang dijadikan bahan perbaikan di masa mendatang

Capaian sasaran kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebagai mana tercantum dalam perjanjian kinerja terdiri atas 4 ( Empat ) sasaran strategis, 15 ( Lima Belas ) indikator sasaran 8 program dan 28 kegiatan berupa kegiatan rutin Dinas Peternakan Kabupaten Bone sesuai kuantitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.  
Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2020 terhadap target tahun 2020.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Target 2021
			2020	2020	
1	Pesentase Peningkatan Produksi telur (%)	%	1,00	1,00	1,50
2	PersentasePeningkatan Produksi Daging Sapi (%)	%	1,00	2,00	2,00
3	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Peternakan (Milyar)	Rp	1.218.755.000	1.230.943.000	1.243.252.000
4	Persentase Kelahiran Ternak Sapi Hasil Inseminasi Buatan (%)	%	1,00	2,00	3,00
5	Persentase Ternak / bibit Sapi yang bersertifikat (%)	%	1,00	1,00	2,00

6	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	%	2,00	2,00	2,00
7	Predikat SAKIP oleh APIP		cc	CC	B

Sumber : Data Dinas Peternakan tahun 2020.

Dari tabel diatas terlihat realisasi capaian kinerja dapat kita lihat dengan adanya peningkatan dalam setiap tahunnya. Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip Good Governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bila dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan

pemberi amanah. Dinas Peternakan Kabupaten Bone selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melalui penyajian laporan Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Bone yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing – masing indikator sasaran strategis

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2020 Dinas Peternakan Kabupaten Bone berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi analisis terhadap pengukuran kinerja.



**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catat an Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PesentasePeningkatanProduksitelur (%)			1,00	1,00	1,50	2,00	1,00	1,50	1,50	2,00	
2	PersentasePeningkatanProduksiDagingSapi (%)			1,00	2,00	2,00	2,70	2,00	2,00	2,00	2,70	
3	PendapatanAsli Daerah dariSektorPeternakan (Milyar)			1.218.755	1.230.943	1.243.252	1.255.684	1.230.943	1.243.252	1.243.252	1.255.684	
4	PersentaseKelahiranTernakSapiHasilInseminasiBuatan (%)			1,00	2,00	3,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
5	PersentaseTernak / bibitSapi yang bersertifikat (%)			1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	3,00	
6	PersentasePenurunanAngkaKematianTernak (%)			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
7	Predikat SAKIP oleh APIP			CC	CC	B	B	CC	B	B	B	

Watampone, 01 Juli 2020

**KEPALA DINAS  
PETERNAKAN KAB. BONE**

Drh. H. ARIS HANDONO

NIP : 19611030 199003 1 003



### ***2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah***

Untuk dapat menyusun isu-isu Penting yang dialami dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Bone serta mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhinya. Beberapa isu-isu Penting dan permasalahannya yang dihadapi Dinas Peternakan adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan instansi vertikal seperti Kementerian Pertanian, instansi dengan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penyusunan Renja SKPD belum maksimal. Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah seharusnya melakukan koordinasi dalam penyusunan Renja SKPD untuk memastikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang ada . Namun, peran ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh Dinas Peternakan kabupaten Bone dalam penyusunan Renja.
2. Sinergitas Renja SKPD belum maksimal sinergitas antara prioritas pembangunan dan target capaian kinerja Renja Dinas Peternakan Kabupaten Bone belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena penetapan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja dalam RPJMD kurang jelas, dalam menjabarkan program prioritas dan menetapkan indikator kinerja dan tergetnya sesuai arah dan kebijakan umum dalam RPJMD.
3. Ketersediaan data base pembangunan masih kurang

Ketersediaan data base pembangunan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam memberikan informasi tentang kondisi yang ada saat ini. Dari data base inilah, perencana mampu menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas dengan menetapkan indikator kinerja pembangunan secara akurat

dengan target kinerja yang terukur. Hal ini masih menjadi permasalahan, seluruh SKPD belum mempunyai basis data yang baik sehingga pengelolaan data bersifat insidental yang hasilnya sangat subjektif dan tidak akurat. Demikian pula data yang disajikan oleh lembaga resmi masih mengikuti format lama yang sangat kaku. Data yang disajikan sangat terbatas, sehingga banyak data yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan yang tidak disajikan.

#### 4. Pelaksanaan Evaluasi belum optimal

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan menghasilkan laporan kegiatan yang hanya berisi rencana dan realisasi keuangan dan fisik kegiatan tersebut. Laporan ini belum dapat menyajikan outcome ( hasil ) dari kegiatan/program tersebut dan bagaimana kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

### **PERMASALAHAN DAN HAMBATAN:**

#### **Permasalahan**

1. Sarana dan prasarana teknologi peternakan Yang Sangat Terbatas.
2. Kemampuan dan keterampilan peternak masih rendah
3. Penerapan teknologi belum mandiri
4. Meningkatnya Pematangan betina produktif
5. Pola pemeliharaan masih tradisional dan merupakan usaha sampingan.
6. Produktivitas ternak masih rendah akibat kelemahan manajemen

#### **HAMBATAN**

1. Masih adanya ancaman penyakit zoonosis di Kabupaten Bone

2. Pelaksanaan kajiterap belum memberikan kesejahteraan bagi peternak
3. Masih rendahnya kualitas SDM peternak di Kabupaten Bone mengenai mekanisme peternakan yang baik
4. Terbatasnya petugas peternakan dalam menjangkau luas wilayah
5. Belum memprioritaskan pelibatan pemberdayaan perempuan dan peternak miskin pada pengembangan sumber daya manusia dan data pilah.
6. Pembangunan kawasan peternakan yang berwawasan agribisnis dan agroindustri belum di rencanakan berdasarkan pendekatan politis daerah pemilihan untuk mengintegrasikan pendekatan partisipatif.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

(1) Maksud Review terhadap rancangan awal RKPD adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka 1 Tahun sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan yang akan dicapai Tahun 2021.

(2) Tujuan Review terhadap Rancangan awal RKPD adalah :

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Bone kearah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan .
- b. Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD;
- c. Arah Kebijakan Tahunan diuraikan secara tegas
- d. Menjadi bahan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- e. Memberikanperbaikan redaksional pada sub bab Maksud dan Tujuan
- f. Memberikan Tambahan beberapa regulasi terkait kebijakan Pemerintah

Daerah

- g. Memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai visi jangka Satu tahun yang telah disepakati bersama;

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Dinas peternakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000 )	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Perencanaan					Program Perencanaan					
	Pembangunan daerah					Pembangu n daerah					
	Monitoring, Evaluasi Dan	Kecamatan	Teridentifikasinya	61 kali		Monitoring, Evaluasi Dan	Kecamata n	Teridentifikasiny a	61 kali	229,811,900.00	
	Pelaporan Pelaksanaan	Tanete Riattang	Pelaksanaan Rencana			Pelaporan Pelaksanaan	Tanete Riattang	Pelaksanaan Rencana			
	Rencana Pembangunan		Pembangunan			Rencana Pembanguna n		Pembangunan			
2	Program Pelayanan					Program Pelayanan					
	Administrasi Perkantoran					Administrasi Perkantoran					



	Rapat-rapat Kordinasi dan	kec. taneteriattang	Lancarnya koordinasi	311 kali		Rapat-rapat Kordinasi dan	kec. Taneteriattang	Lancarnya koordinasi	311 kali	170,000,000.00
	Konsultasi Dalam Daerah dan		Dan tersedianya Informasi Dari Daerah Sekitar			Konsultasi Dalam Daerah dan		Dan tersedianya Informasi Dari Daerah Sekitar		
	Luar daerah					Luar daerah				
	Pelaksanaan Administrasi	kec. taneteriattang	Tersedianya ATK,	48 paket		Pelaksanaan Administrasi	kec. Taneteriattang	Tersedianya ATK,	48 paket	112,534,550.00
	Perkantoran		Barang cetak, jasa penggandaan dan			Perkantoran		Barang cetak, jasa penggandaan dan		
			Penggandaan Dan					Penggandaan Dan		
			Makan					Makan		
3	Program Peningkatan Sarana					Program Peningkatan Sarana				
	Dan Prasarana Aparatur					Dan Prasarana Aparatur				
	Pemeliharaan Rutin/berkala	kec. Tanete Riattang	Terpeliharanya Secara Rutin/berkala	1 paket		Pemeliharaan Rutin/berkala	kec. Tanete Riattang	Terpeliharanya Secara Rutin/berkala	1 paket	625,760,000.00
	Gedung Kantor					Gedung Kantor				

			Gedung Kantor				Gedung Kantor			
	Pemeliharaan Rutin/berkala	kec. Tanete Riattang	Terpeliharanya	16 unit		Pemeliharaan Rutin/berkala	kec. Tanete Riattang	Terpeliharanya	16 unit	102,250,000.00
	Kendaraan Dinas/operasional		Kendaraan Dinas /Operasional			Kendaraan Dinas /Operasional				
	Pemeliharaan Rutin/berkala	kec. Tanete Riattang	Terpeliharanya	51 unit		Pemeliharaan Rutin/berkala	kec. Tanete Riattang	Terpeliharanya	51 unit	10,000,000.00
	Perlengkapan Gedung Kantor		Secara Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Perlengkapan Gedung Kantor		Secara Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pendidikan Dan Pelatihan	kec. Tanete Riattang	Meningkatnya Kapasitas aparatur di Bidang Tugasnya	100% 12		Pendidikan Dan Pelatihan	kec. Tanete Riattang	Meningkatnya Kapasitas aparatur di Bidang	100% 12	70,000,000.00
	Formal					Formal				

							Tugasnya		
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
	Pelatihan Petani Dan Pelaku	27 kecamatan	Meningkatnya	1 kali		27 kecamatan	Meningkatnya	1 kali	75,000,000.00
	Agribisnis		Kapasitas Petani dan			Agribisnis	Kapasitas Petani dan		
			Pelaku Agribisnis				Pelaku Agribisnis		
	Pembinaan Petani dan Pelaku	27 kecamatan	Meningkatnya	55 kali		27 kecamatan	Meningkatnya	55 kali	315,995,000.00
	Agribisnis		Kapasitas Petani dan pelaku				Kapasitas Petani dan pelaku		
			agribisnis				agribisnis		
6	Program Pencegahan Dan						Program Pencegahan Dan		
	Penanggulangan Penyakit Ternak						Penanggulangan Penyakit Ternak		
	Pemeliharaan Kesehatan Dan	27 KECAMATAN	Terjaminnya	1 paket		27 KECAMATAN	Terjaminnya	1 paket	266,995,000.00

	Pencegahan Penyakit		Kesehatan Serta		Pencegahan Penyakit		Kesehatan Serta		
	Menular Ternak		Tercegahnya Penyakit Menular Ternak		Menular Ternak		Tercegahnya Penyakit Menular Ternak		
7	Program Peningkatan				Program Peningkatan				675,219,850.00
	Produksi Hasil Peternakan				Produksi Hasil Peternakan				
	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	27 kecamatan	Terbinanya Pembibitan dan Terawatnya Ternak	30 kali	Pembibitan Dan Perawatan Ternak	27 kecamatan	Terbinanya Pembibitan dan Terawatnya Ternak	30 kali	102,270,000.00
	Pengembangan Agribisnis Peternakan	27 kecamatan	Meningkatnya Bisnis Peternakan	20 paket	Pengembangan Agribisnis Peternakan	27 kecamatan	Meningkatnya Bisnis Peternakan	20 paket	399,800,000.00
	Peningkatan sarana dan Prasarana inseminasi	27 kecamatan	Terfasilitasinya Kebutuhan Peralatan	255 kali	Peningkatan sarana dan Prasarana inseminasi	27 kecamatan	Terfasilitasinya Kebutuhan Peralatan	255 kali	73,149,850.00

	buatan					buatan				
			Dan Perlengkapan IB					Dan Perlengkapan IB		
8	Program Peningkatan					Program Peningkatan			534,849,700.00	
	Pemasaran Hasil Produksi					Pemasaran Hasil Produksi				
	Peternakan					Peternakan				
	Pemeliharaan Rutin/berkala	KECAMATA N	Terpeliharanya	3 paket		Pemeliharaan Rutin/berkala	KECAMA TAN	Terpeliharanya	3 paket	242,025,000.00
	Sarana dan Prasarana Pasar	TANETERIA TTANG	Sarana Dan			Sarana dan Prasarana Pasar	TANETER IATTANG	Sarana Dan		
	Produksi Hasil Peternakan		Prasarana Pasar			Produksi Hasil Peternakan		Prasarana Pasar		
			Produksi					Produksi		
	Promosi Atas Hasil Produksi	27 KECAMATA N	Terfasilitasinya	5 kali		Promosi Atas Hasil Produksi	27 KECAMA TAN	Terfasilitasinya	5 kali	93,199,900.00
	Peternakan Unggulan Daerah		Promo Produksi			Peternakan Unggulan Daerah		Promo Produksi		
			Unggulan daerah					Unggulan daerah		



### ***2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat***

Perencanaan diawali dengan musyawarah Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Dinas Peternakan dimaksud disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bone Dan Berdasar pada Renstra, maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap Tahun, dengan mempertimbangkan hasil musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bone. Rencana program dan kegiatan tersebut, merupakan pedoman dasar untuk pelaksanaan kegiatan 1 tahunan Dinas Peternakan. Proses perencanaan ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai wujud masa depan yang akan mencerminkan kebutuhan yang fundamental dalam bidang peternakan, maka visi peternakan dilaksanakan dengan merefleksikan kebutuhan kedalam dinamika pembangunan peternakan dari berbagai aspek.

Pelaksanaan program pembangunan peternakan yang diimplementasikan kedalam program jangka menengah/program tahunan sesuai visi – misi peternakan, dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan.

Adanya Perhatian Pemerintah baik pemerintah daerah, Propinsi Dan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Peternakan dengan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan produksi dan Pengendalian Penyakit Ternak merupakan suatu Kesiapan strategi untuk Membanguanan Peternakan.

Pengembangan kawasan budidaya, khususnya budidaya ternak secara langsung memberikan dampak terhadap adanya kebijakan-kebijakan politik, baik kepala daerah maupun DPRD. Pada kawasan-kawasan tersebut dapat dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk pengembangan peternakan, sehingga mampu mendorong upaya pengentasan kemiskinan.

Tabel C32  
Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone

No	Program	Sub Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	Jenis Usulan	Volume	Satuan
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Dusun Toasae, Kab. Bone, Bontocani, Bulu Sirua	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Ayam	250	Ekor
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Desa Tellangkere, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Bone, Kab. Bone, Tellulimpoe, Tellang Kere	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Sapi	5	Ekor
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Dusun Batu Lappa Desa Siame Kec. Palakka Kab. Bone, Kab. Bone, Palakka, Siame	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Sapi	5	Ekor
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	RT 1, RT 2, RT 3, Dusun Pallabureng, RT 1, RT 2, RT 3, Dusun Massila RT 1, RT 2, Dusun Barugae RT 1, RT 2, Mattoanging RT 1, RT 2, Dusun Kadieng, Kab. Bone, Patimpeng, Massila, Kab. Bone, Patimpeng, Massila	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Sapi	5	Ekor
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	BUMDES MAPAKKARIO (Desa Massenrengpulu), Kab. Bone, Lamuru, Massenreng pulu	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Ayam	250	Ekor
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	desa pattiro riolo kec.sibulue kab.bone, Kab. Bone, Sibulue, Pattiro Riolo	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Sapi	5	Ekor
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Desa Watang Palakka Kec. Tanete Riattang	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Sapi	5	Ekor

## Rencana Kerja (Renja) DPKH 2022

8	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Desa Congko, Kec. Barebbo	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Sapi	5	Ekor
9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Papolo, Kec. Tanete Riattang	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Sapi	5	Ekor
10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Desa Mabbiring, Kec. Sibulue	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Kambing	8	Ekor
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Desa Arellae Kec. Kahu	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak	Sapi	5	Ekor
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Desa Barakkae Kec. Lamuru		Kambing	8	Ekor
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Desa Libureng Kec. Tonra		Kambing	8	Ekor

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional mengenai kemandirian pangan termasuk komoditas peternakan khususnya swasembada Daging (2026). Saat ini konsumsi hewani penduduk Indonesia Sangat Rendah (sekitar 6 g/kapita/hari) dan diperkirakan akan meningkat tajam apabila Pendapatan Penduduk terus meningkat yang prediksi mencapai US\$ 13.000 pada Tahun 2025 sesuai target MP 3EI 2025. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Perlu menyiapkan Strategi Pembangunan peternakan jangka menengah dan panjang secara berkelanjutan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal, dalam hal ini, selain mengeksplorasi sumber daya Genetik ternak yang efisien dalam penggunaan pakan, juga harus dapat memanfaatkan bahan pakan berupa produk samping tanaman maupun industri Pertanian yang bersaing dengan bahan pangan, kebijakan ini harus didukung dengan inovasi teknologi yang telah dihasilkan maupun yang perlu dikembangkan. Peningkatan produktivitas dan produksi ternak secara berkelanjutan dengan pola seperti ini dapat menghemat sumber daya alam sekaligus menekan emisi gas Rumah Kaca dalam rangka mewujudkan Konsep green economy.

Menjadi acuan utama penyelenggaraan program/kegiatan di Daerah indikator akan pertumbuhan populasi menjadi indikator utama di sektor peternakan. Dinas Peternakan kabupaten Bone telah respon atas fokus utama pembangunan yang visinya menyentuh pemberdayaan dan kemandirian petani. Dengan cara bisnis penanaman Tehnologi inseminasi buatan dengan berbagai

bangsa sapi yang dituankan keprogram dan kegiatan Dinas yang berkelanjutan dari tahun ketahun.

Kegiatan yang hanya didanai oleh anggaran tidak cukup untuk mendorong laju pertumbuhan populasi ternak sehingga diperlukan program/Kegiatan yang saling terintegrasi dari berbagai sektor termasuk pentingnya integrasi tanaman dan ternak dalam membangun elektrsitis lingkungan yang aman dan perlu kesepakatan petani.

Perlu keputusan dan kebijakan cerdas membangun sumbangsi program melalui pencapaian visi kabupaten dengan pendekatan ekonomi sesuai sasaran RPJMD. Simpul Koordinasi yang dimulai dari perencanaan yang matang dan fleksibel untuk membangun kerangka pembangunan menjadi penting, namun membangun jejaring

koordinasi pembangunan diluar panel birokrasi khususnya perangkat pembiayaan baik dari sektor perbankan maupun investasi swasta dengan relevan untuk dikaji dan dikembangkan.

### ***1.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah***

#### **TUJUAN :**

Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bone untuk tahun anggaran 2020 senantiasa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya peternak antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat yang mampu berperan dalam menciptakan usaha peternakan yang handal dan dapat bersaing di Pasar Domestik maupun Internasional.
2. Mewujudkan kawasan peternakan yang maju, mandiri dan produktif yang berwawasan agribisnis dan angroindustri.

3. Mewujudkan masyarakat peternak yang mampu menguasai Teknologi Peternakan dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal dan mampu menciptakan lapangan kerja di bidang peternakan.
4. Meningkatkan dan memperluas kesempatan dan lapangan kerja dibidang usaha peternakan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi peternakan.
6. Meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan konsumsi dan bahan baku industri.
7. Meningkatkan mutu produksi yang dapat bersaing di era pasar global.
8. Mempercepat pertumbuhan populasi ternak dalam mewujudkan percepatan populasi Dua juta ekor dan swasembada daging.

**SASARAN :**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan peternakan yang terarah maka pada rencana kerja pembangunan peternakan diarahkan pada sasaran program kegiatan 2021, yakni mewujudkan peternak yang maju, efisien, dan tangguh yaitu kondisi dimana pelaku pembangunan peternakan mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal (alam, modal, teknologi Dan tenaga), mampu meningkatkan gejolak agribisnis pada struktur produksi, mampu memenuhi tuntutan pasar serta berperan dalam membangun daerah dan regional. adapun sasaran pembangunan peternakan kabupaten bone Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi Ternak Unggulan
2. Meningkatkan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian ternak.
3. Mencegah pemotongan ternak betina produktif

4. Pengembangan alat dan mesin budidaya ternak ruminansia, pengolahan pakan ternak dan pengolahan limbah pertanian
5. Pengembangan usaha penggemukan dan perbaikan sistim budidaya
6. Peningkatan produksi dan produktifitas ternak sapi dalam mencapai - Swasembada daging 2026.
7. Peningkatan populasi ternak sapi sekitar 7 - 10 % pertahun.
8. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani ternak.
9. Peningkatan sarana prasarana pembangunan peternakan.

### ***1.3 Program dan Kegiatan***

Dengan berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah adalah

Visi Bupati Bone terjabar kedalam 6 misi Dinas Peternakan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau adil dan merata.
2. Meningkatkan pemertaaan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

Dilihat dari kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan, relevansi kinerja sangat erat kaitannya dengan visi Bupati yaitu Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.

**Mandiri**, Dinas Peternakan memiliki perhatian yang kuat terhadap kondisi Kemandirian kesehatan ternak yang ada di Kabupaten Bone. Hal ini dilandasi oleh

persepsi bahwa konsumsi hasil peternakan yang Mandiri, berkualitas dan sehat akan mampu memberikan sumbangan positif terhadap tingkat Kemandirian kesehatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya upaya Kemandirian dalam pencegahan penyakit hewan ( Zoonosis ), diharapkan terjadinya penularan zoonosis kepada manusia dapat diminimalisir.

**Berdaya Saing**, Dinas Peternakan Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi petani ternak dalam rangka Memanfaatkan Keunggulan Inovatif, Komparatif Dan Kompetitif meningkatkan hasil peternakan yang dimiliki. Kondisi demikian, akan memberikan sebuah kontribusi positif terhadap keberdayaan masyarakat sehingga secara langsung mendukung terhadap visi bupati untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Bone Mampu Berdaya Saing.

**Sejahterah**, Implementasi dari pelaksanaan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Dinas Peternakan, nantinya diharapkan akan mampu untuk memberikan kontribusi positif terhadap hasil peternakan yang secara langsung juga akan memberikan hasil positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Peternakan juga memiliki kontribusi terhadap capaian misi bupati, yaitu pada misi kedua “ **Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Daerah, Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Dan Kelestarian Lingkungan** “. Gambaran pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan adalah dengan mengembangkan ekonomi yang berbasis kerakyatan, yaitu penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan peternakan secara optimal, Mandiri dan Berdaya saing.

➤ **Jumlah program dan jumlah kegiatan.**

Jumlah Program 8 Buah dan Jumlah Kegiatan 25 Buah Sebagai Berikut:

**1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.**

- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak

**2. Program Peningkatan produksi hasil Peternakan**

- a. Pembibitan dan Perawatan Ternak
- b. Pengembangan Agribisnis Peternakan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan

**3. Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.**

- a. Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
- b. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
- c. Peningkatan Pengelolaan dan pemasaran produksi hasil peternakan dengan

**4. Program Penunjang Pemerintahan Umum**

- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- b. Pengelolaan Website Perangkat daerah
- c. Promosi Dan Pameran Pembangunan

**5. Program Peningkatan kesejahteraan Petani.**

- a. Pembinaan Petani dan Pelaku Agribisnis

**6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

**7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional

- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pengadaan Meubelair
- e. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas Operasional
- g. Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor

**8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Administrsai Keuangan
- d. Penyediaan Bahang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- f. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bone yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, maka akan dilaksanakan 5 program, 16 Kegiatan dan 34 Sub. Kegiatan dengan mengacu pada Program dan Kegiatan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, Adapun pelaksanaan Program Prioritas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone	48 Paket	42,000,730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	85,000,000
---	----	----	------	----	--	---	---------------------------------------	----------	------------	--------------------------------------	------------



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1400 Kotak			36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,000,000
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		16 Paket			20,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			45,000,000
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		168 Kali			19,320,000				30,000,000
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		75 Kegiatan			178,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			400,000,000
3 27 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>56,020,000</b>				<b>150,000,000</b>
3 27 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		3 unit/buah			56,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
3 27 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>341,976,750</b>				<b>225,000,000</b>
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Realisasi Pembayaran Rekening Telpor/ Internet, Listrik dan Air		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		72 Rekening			128,875,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		24 Paket			5,089,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			25,000,000
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Yang Dibayarkan perbulan		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		468 Kali			208,011,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			200,000,000
3 27 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>110,434,000</b>				<b>485,000,000</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar pajaknya		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		5 unit		22,914,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150,000,000	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		24 unit		11,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35,000,000	
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Paket Pekerjaan Perbaikan/ Pemeliharaan Gedung Kantor		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		2 unit		76,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300,000,000	
3 27 02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>								<b>798,492,760</b>			<b>8,496,806,510</b>	
3 27 02 2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>								<b>75,799,700</b>			<b>3,000,000,000</b>	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Sarana Pertanian Yang Mendapat Pendampingan		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 unit		75,799,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah		3,000,000,000	
3 27 02 2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								<b>93,724,250</b>			<b>346,806,510</b>	
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurniandan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Laporan Kemurniandan Kelestarian SDG Hewan		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		12 Laporan		93,724,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		346,806,510	
3 27 02 2.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>49,418,810</b>			<b>150,000,000</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
3 27 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak		Jumlah Laporan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak		Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		49,418,810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150,000,000	
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								579,550,000			5,000,000,000	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Kambing Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Sapi Jumlah Pengadaan N2 Cair Jumlah Pengadaan Straw/semen beku Jumlah Pengadaan Unggas dan Aneka		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		320 ekor 85 ekor 3000 Liter 7000 dosis 20000 ekor		579,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		5,000,000,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								140,804,790			250,000,000	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian								140,804,790			250,000,000	
3 27 03 2.02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang di Rehabilitasi/ Pemeliharaan				1 unit		140,804,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250,000,000	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								589,124,950			847,000,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota								231,465,000			300,000,000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Pengadaan Vaksin Anthrax dan Rabies		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		21500 Dosis		231,465,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		300,000,000	
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								284,268,000			397,000,000	
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Unit Usaha/Klp yang mendapatkan pendampingan		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		12 unit		87,338,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		175,000,000	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Produk Hewan		Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		12 laporan		196,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		222,000,000	
3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan								73,391,950			150,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
3 27 07 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		Jumlah unit Pendampingan Penerapan Kesejahteraan Hewanraan Hewan	Kab. Bone, Semua Kecamatan ,Semua Kelurahan		4 unit		73,391,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000	
3 27 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>						<b>269,089,940</b>					<b>550,000,000</b>	
3 27 07 2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>						<b>269,089,940</b>					<b>550,000,000</b>	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PenyuluhanPertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Penyuluh yang mengikuti peningkatan kapasitas	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		3 orang		58,034,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000	
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Kab. Bone, Tanete Riattang, Watampone		3 unit usaha		211,055,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			450,000,000	
					<b>TOTAL</b>			<b>9,645,585,500</b>				<b>22,485,912,110</b>	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

(Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2022 merupakan acuan yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Bone dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun 2022

Dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada baik potensi sumberdaya manusia dan potensi sumber daya alam serta teknologi, peranan sektor peternakan dan kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Bone cukup strategis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberhasilan pembangunan tersebut sangat tergantung pada peran aktif seluruh stakeholder pembangunan di sektor peternakan dan kesehatan hewan serta profesionalisme kedisiplinan seluruh aparatur pemerintah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Penjabaran dan Tindak Lanjut

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun 2022 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam RAPBD 2022 dan RKA/DPA 2022.

- Penanggung Jawab Pelaksanaan Renja PD

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone menjadi penanggung jawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone.

- Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian pelaksanaan renja Dinas mencakup program dan kegiatan , lokasi, pagu indikatif serta perkiran maju dan indikator kineja serta kelompok sasaran;. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Dinas; Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan program dan kegiatan, lokasi , dana indikatif yang disusun ke dalam RKA sesuai dengan Renja Dinas. Selain itu dilakukan Penginputan dan Pelaporan Evaluasi Renja Per Triwulan.

- Penegasan mengenai perlunya partisipasi masyarakat

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, Pertama : perlu aspiratif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Kedua : pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya ,salah satunya melalui proses musrembang (musyawarah-perencanaan pembangunan) dengan tingkatan, musrembang nasional, musrembang provinsi, musrembang kota/kabupaten dan musrembang kelurahan/ desa

- Hal-hal Lain Yang Dianggap perlu :

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil:

1. Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renja PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone, dimana bersama dengan Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi Renja dilakukan setiap triwulan baik melalui aplikasi ataupun pelaporan manual.
4. Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bone dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

7. Dalam pelaksanaannya, Renja ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Tahun 2022 dibuat untuk dilaksanakan.



# RENCANA KERJA TAHUN 2022

DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE TAHUN 2022